

**KONFLIK DAN KETIDAKEFEKTIFAN REKONSILIASI**  
**(Studi Kasus Konflik Penambangan Pasir Mekanik dan Rekonsiliasi Melalui Program**  
**Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif di Desa Gebangbunder**  
**Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dalam Perspektif Lewis Coser)**

Oleh:

Anita Ayu Fatmaningtias  
 NIM. 105120103111003

**ABSTRAKSI**

Aktivitas penambangan pasir mekanik di Kabupaten Jombang menyebabkan konflik terjadi antara pemerintah dalam usaha penertiban pelanggaran Perda serta masyarakat DAS Brantas. Pemerintah Kabupaten Jombang bekerja sama dengan BBWS Brantas dan PJT I untuk aktivitas penambangan pasir melalui Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif, penambang pasir dialihkan pekerjaannya. Permasalahannya yang muncul adalah aktivitas penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder masih berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik penambangan pasir dan menganalisis faktor penyebab rekonsiliasi konflik melalui Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas yang berjalan tidak efektif di Desa Gebangbunder. Penelitian ini menggunakan teori konflik sosial dari Lewis Coser, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive*. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, rekaman arsip dan perangkat fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder mengalami dinamika, mulai dari pra konflik hingga mengalami situasi krisis dan mengalami deeskalasi dengan adanya Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif sebagai katup penyelamat konflik. Implementasi dari program pemberdayaan yang digagas oleh Pemda Jombang, BBWS Brantas dan PJT I tidak berjalan efektif. Ketidakefektifan perumusan program, kuatnya solidaritas penambang pasir, kegagalan pemerintah dalam menjalankan program menjadi faktor penyebab ketidakefektifan Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif.

**Kata Kunci :** Dinamika Konflik, Solidaritas, Rekonsiliasi

**ABSTRACT**

Mechanical sand mining activities in Jombang cause a conflict occurs between the government in an effort to curb violations of legislation and the public of Brantas river basin. The government of Jombang collaborate with BBWS Brantas and PJT I for sand mining activities through the Brantas River Levee Safety Program Based Participatory, sand miners diverted his job. The problem that arises is the mechanical sand mining activities in the village Gebangbunder still ongoing. This study aims to analyze the dynamics of conflict sand mining and analyzing the causes of conflict through reconciliation Brantas River Levee Safety Program running in the village Gebangbunder ineffective. This study uses the theory of social conflict Lewis Coser, using qualitative methods with case study approach. Informants determined using purposive technique. Sources of data obtained through interviews, observation, documentation, archival records and physical devices. The results showed that the sand mining conflicts in the village Gebangbunder experienced mechanical dynamics, ranging from pre-conflict to experience a crisis situation and experience deescalation with the Brantas River Levee Safety Program Based Participatory conflict as a safety valve. Implementation of development programs initiated by the local government of Jombang,

BBWS Brantas and PJT I was not effective. Ineffectiveness program formulation, the strong solidarity sand miners, the government's failure in running the program into the causes of the ineffectiveness of the Brantas River Levee Safety Program Based Participatory.

**Keywords:** Conflict Dynamics, Solidarity, Reconciliation

## **PENAMBANGAN PASIR MEKANIK**

Berdasarkan Profil BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Brantas (2008:4) bahwa 37% panjang Sungai Brantas melewati Kabupaten Jombang. Keberadaan Sungai Brantas memberi banyak manfaat kepada warga sekitar, disisi lain memberi peluang terjadinya permasalahan lingkungan. Pasir yang terkandung di sungai memiliki nilai ekonomi yang tinggi, menyebabkan Sungai Brantas dijadikan sebagai lokasi strategis bagi aktivitas penambangan pasir. Penambangan pasir mengalami modernisasi alat pada tahun 2000, sebelumnya penambangan dilakukan dengan alat tradisional berupa *cikrak*, karena kedalaman sungai yang semakin dalam menyebabkan kesulitan dalam pengambilan pasir akhirnya penambang menggunakan mesin penyedot pasir (*sandpump*).

Pada tahun 2010 terdapat 400 lebih jumlah penambangan pasir di Kabupaten Jombang, yaitu penambangan tradisional maupun penambangan pasir mekanik ([www.jombangkab.go.id](http://www.jombangkab.go.id), 2012). Aktivitas penambangan pasir dengan menggunakan alat mekanik menjadi salah satu penyebab longsornya tanggul. Tahun 2010 ditemukan 27 titik tanggul bantaran Sungai Brantas yang telah longsor serta terdapat 212 aktivitas penambangan pasir dengan menggunakan alat mekanik di wilayah aliran Sungai Brantas sepanjang aliran Jombang hingga Mojokerto (Wibowo, 2010).

Aktivitas penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang melanggar Pasal 7 Perda (Peraturan Daerah) Prov. Jatim No. 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan

Bahan Galian Golongan C yang menjelaskan bahwa usaha pertambangan dilakukan dengan cara manual/tradisional dan tidak menggunakan alat-alat mekanik. Pelanggaran Perda tersebut menyebabkan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kecamatan Plandaan. Penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder tidak memiliki surat izin resmi untuk melakukan aktivitas tersebut. Satpol PP dalam melakukan penertiban bekerja sama dengan Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) Plandaan seperti, Polsek, Koramil dan pemerintah kecamatan melalui operasi Patas (Pengamanan Sungai Brantas). Upaya penertiban yang dilakukan Satpol PP seperti, penyitaan alat-alat penambang pasir mekanik, penembakan peringatan hingga penangkapan penambang pasir mekanik. Pemerintah Daerah Jombang juga melakukan sosialisasi kepada penambang pasir mekanik tentang pentingnya keberadaan Sungai Brantas dan bahayanya aktivitas penambangan pasir mekanik.

Warga DAS Brantas menuai berbagai protes karena aktivitas penambangan pasir mekanik yang semakin berkembang dan mengancam pada pemukiman warga bantaran sungai, terutama dampak tergerusnya bantaran sungai hingga menyebabkan banjir. Warga DAS Brantas Desa Gebangbunder melakukan protes kepada Kepala Desa Gebangbunder. Aktivitas penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan dilakukan di area tanah hasil sedimentasi Sungai Brantas. Letak aktivitas penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder berbatasan dengan Desa Megaluh Kecamatan Megaluh. Galangan penambangan pasir terletak di Desa

Gebangbunder, namun dalam aktivitasnya penambangan pasir mekanik seringkali mendekat di sekitar tanggul wilayah Desa Megaluh. Reaksi dari aktivitas penambangan pasir mekanik juga dilakukan oleh warga DAS Brantas Desa Megaluh dengan *mengketapeli* para penambang pasir. Berikut peta Desa Gebangbunder dan posisi penambangan pasir mekanik:



(Sumber: Diolah dari Google Earth, 2014)

**Gambar 1. Peta Desa Gebangbunder dan Posisi Penambangan Pasir Mekanik**

Reaksi warga Desa Gebangbunder akibat aktivitas penambangan pasir mekanik menyebabkan konflik antara penambang pasir dengan pemerintah dan warga DAS Brantas. Konflik penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder memuat berbagai kepentingan, permusuhan dan penindasan. Perbedaan kepentingan antara penambang pasir mekanik dan warga bantaran sungai menjadi alasan terjadinya konflik. Aspek ekonomi menjadi alasan bagi penambang pasir mekanik, berbanding terbalik dengan kebutuhan rasa nyaman oleh warga DAS Brantas. Konflik penambang pasir mekanik dengan warga DAS Brantas mulai memanasi pada sekitar tahun 2010 (Mubarak, 2010).

Menurut Lewis Coser menjelaskan tentang konflik, dimana menurut Coser konflik tidak selalu bernilai negatif, dengan adanya konflik akan melahirkan konsensus dalam sebuah kelompok (Coser, 1957:197). Konflik akan menciptakan negosiasi untuk menghentikan konflik. Konflik penambangan pasir mekanik di Desa

Gebangbunder menciptakan solidaritas Pemda Jombang dengan pihak-pihak terkait dengan pemelihara Sungai Brantas. Solidaritas akan tercipta atas kepentingan yang sama, Pemda Jombang, BBWS Brantas dan PJT I mempunyai kepentingan yang sama untuk melindungi Sungai Brantas.

### **PROGRAM PENGAMANAN TANGGUL SUNGAI BRANTAS BERBASIS PARTISIPATIF**

Tahun 2010 Pemda Jombang bekerja sama dengan BBWS Brantas dan PJT I untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir mekanik (BPM-PD Kabupaten Jombang, 2010). Pemda Kabupaten Jombang, BBWS Brantas dan PJT I menghasilkan Kesepakatan Bersama (MoU) melalui Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif. Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif bertujuan untuk mengamankan Sungai Brantas melalui partisipasi mantan penambang pasir mekanik di wilayah Kabupaten Jombang (Portal Kementerian BUMN, 2012). Mantan penambang pasir diberdayakan agar beralih pekerjaan dan kesejahteraannya terjamin. Program tersebut memiliki 2 (dua) sub program yaitu, Pokmas Brantas dan Jogo Tanggul. Pokmas Brantas merupakan program dimana mantan penambang pasir diberi modal melalui hewan ternak atau uang tunai untuk dikembangkan. Jogo tanggul merupakan program pemberdayaan kepada mantan penambang pasir dalam memelihara tanggul Sungai Brantas dari penambang pasir dan tanaman liar yang merusak tanggul sungai.

Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif sebagai lembaga yang secara sengaja dibentuk karena adanya konflik penambangan pasir mekanik. Tujuan program tersebut yaitu penambang pasir dapat mengalihkan pekerjaannya sehingga akar permasalahan dari konflik tersebut dapat teratasi. Program pemberdayaan

tersebut menjadi katup penyelamat (*safety-valve*). Menurut Coser (1956, dikutip dari Polama, 1987:109) katup penyelamat berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan, tanpa itu hubungan-hubungan di antara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin tajam. Katup penyelamat dapat mengatur konflik, karena adanya katup penyelamat anggota yang berkonflik dapat mengaspisasikan keluhannya terhadap struktur, sehingga permusuhan tersalurkan tanpa menghancurkan struktur dalam anggota tersebut.

Implementasi Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif di Kabupaten Jombang tidak efektif, aktivitas penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder masih berlangsung. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti ingin mengetahui dinamika konflik penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder dan rekonsiliasi Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif sebagai katup penyelamat tidak bisa berjalan efektif. Peneliti sebagai instrumen kunci ingin meneliti pada obyek konflik penambangan pasir mekanik secara alamiah, oleh karena itu metode yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik.

Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif merupakan MoU dari kesepakatan antara Pemda Jombang, BBWS Brantas dan PJT I. Melalui pendekatan yang berbasis partisipasi yang melibatkan masyarakat untuk menjaga dan melindungi Sungai Brantas dengan menumbuhkan kesadaran kritis, keikutsertaan dan rasa memiliki Sungai Brantas. Tujuan dari Kesepakatan Bersama (MoU) tersebut adalah *pertama*, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengamanan sungai. *Kedua*, meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal perlindungan, pengembangan dan penggunaan sungai melalui penyuluhan dan bimbingan. *Ketiga*,

membangun ekonomi masyarakat sekitar bantaran Sungai Brantas dengan mengembangkan dan meningkatkan fungsi sungai sebagai potensi ekonomi melalui pelatihan manajemen kelompok dan penyadaran pelestarian.

Wilayah Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif merupakan sepanjang DAS (Daerah Aliran Sungai) Brantas Kabupaten Jombang yaitu sebanyak 8 kecamatan, yang meliputi Kecamatan Bandarkedungmulyo, Megaluh, Plandaan, Ploso, Tembelang, Kudu, Ngusikan dan Kesamben (BPM-PD Kabupaten Jombang, 2012). Sasaran dari program tersebut adalah mantan penambang pasir yang berada di sepanjang DAS (Daerah Aliran Sungai) Brantas. Tujuan akhir dari program tersebut adalah memberdayakan melalui keterlibatan terutama bagi mantan penambang pasir agar sejahtera dalam aspek ekonomi dan menjaga Sungai Brantas.

Hasil dari kesepakatan bersama antara Pemda Jombang, BBWS Brantas dan PJT I menghasilkan Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif. Program tersebut terdapat 2 sub program yaitu, Pokmas Brantas dan Jogo Tanggul. Penanggung jawab dana Pokmas Brantas yaitu Pemkab Jombang dibawah tanggung jawab BPM-PD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) Kabupaten Jombang dan BBWS dibawah tanggung jawab bidang OP (Operasional Program). Bidang OP BBWS Brantas dan BPM-PD Kabupaten Jombang memilih pendamping untuk mendampingi Pokmas Brantas. Kecamatan dan Pemerintah Desa mengawasi berlangsungnya program tersebut.

Pendanaan Program Jogo Tanggul oleh PJT I. Wilayah Kabupaten Jombang merupakan wilayah Brantas Tengah, dimana penanggung jawab pemeliharaannya oleh Divisi Jasa Asa III. PJT I memilih pengawas untuk membantu mengawasi selama berlangsungnya program tersebut. Berikut penjelasan

kedua sub program dari Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif:

### 1) Program Pokmas Brantas

Pokmas (Kelompok Masyarakat) Brantas merupakan pemberdayaan masyarakat dalam sektor ekonomi, melalui kegiatan kewirausahaan guna peningkatan kesejahteraan. Berbagai bentuk usaha dapat dilakukan seperti, peternakan, koperasi dan lain sebagainya. Satu kelompok Pokmas Brantas berjumlah  $\pm 20$  mantan penambang pasir. Pemerintah memberi sejumlah dana untuk digunakan kelompok masyarakat Brantas dalam mengembangkan usaha. Dana yang diberikan dalam satu kelompok berjumlah Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Bantuan keuangan kepada Pokmas Brantas bersifat pinjaman yang jangka waktunya sesuai dengan musyawarah pokmas. Masa tenggang yang dimusyawarahkan perkelompok rata-rata 1-3 tahun. Pendanaan Pokmas Brantas dibagi menjadi 2 sumber anggaran yaitu, dari BPM-PD Kabupaten Jombang yang berasal dari APBD dan BBWS Brantas yang berasal dari APBN.

Berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti melalui data BPM-PD Kabupaten Jombang dan wawancara pada beberapa sumber, jumlah Pokmas Brantas di Kabupaten Jombang sebanyak 43 Pokmas. Tahun 2010 sebanyak 8 orang pendamping Pokmas Brantas telah direkrut, untuk 8 kecamatan DAS Brantas. Fasilitator Kabupaten dimana bertugas sebagai fasilitator untuk membantu Pokmas Brantas dalam program pengamanan tanggul Sungai Brantas (BPM-PD Kabupaten Jombang, 2012). Jumlah anggota Pokmas Brantas di Desa Gebangbunder sebanyak 22 mantan penambang pasir mekanik (BPM-PD, 2012). Berdasarkan musyawarah anggota Pokmas Brantas Desa Gebangbunder, dana yang diberikan pemerintah sebagai pinjaman digunakan untuk membeli hewan ternak. Berdasarkan wawancara dan

observasi penulis implementasi dari Pokmas Brantas tidak berjalan efektif, kambing yang diberikan pemerintah untuk dikembangkan justru dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

### 2) Program Jogo Tanggul

Program Jogo Tanggul merupakan program pengamanan dan pelestarian tanggul Sungai Brantas dengan penanggungjawab anggaran oleh PJT I (Perum Jasa Tirta). Tujuan dari Jogo Tanggul tersebut adalah memberikan pemahaman untuk menjaga dan melestarikan Sungai Brantas dari segala hal yang mengancam sungai, termasuk adanya penambangan pasir mekanik. Anggota Jogo Tanggul setiap bulannya mendapat uang jasa dari Jasa Tirta I sesuai panjang Km bantaran Sungai Brantas sebesar Rp. 1.000.000,00 per Km, uang jasa tersebut dibagi untuk semua anggota Jogo Tanggul (BPM-PD Kabupaten Jombang, 2012). Anggota Jogo Tanggul di Desa Gebangbunder sebanyak 2 orang untuk panjang tanggul 2 Km, anggota tersebut merupakan mantan penambang pasir (Tarpen, wawancara, Februari 28, 2014). Berdasarkan observasi penulis, implementasi dari program Jogo Tanggul tidak berjalan efektif, salah satu anggota Jogo Tanggul wilayah Desa Gebangbunder ikut serta dalam aktivitas penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder. Anggota Jogo Tanggul tidak menjalankan tugasnya untuk melaporkan aktivitas penambangan pasir mekanik yang mengancam Sungai Brantas.

### DINAMIKA KONFLIK

Reaksi dari aktivitas penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder oleh Satpol PP dalam upaya penertiban pelanggaran Perda dan warga DAS Brantas melalui aksi protes maupun pengketapelan dilakukan untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir mekanik. Respon yang dilakukan pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda akan menciptakan *in-group* atau *out-group*

berdasar atas kepentingan yang sama. Tingkat tindakan koersif ketika berada dalam suatu hubungan konflik akan menciptakan dinamika konflik (Susan, 2010:65). Menurut Fisher (2001, dikutip dari Novri Susan, 2010:102) tahapan dinamika konflik meliputi prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pasca konflik.

### 1) Prakonflik

Aktivitas penambangan pasir berawal dari program pemerintah dalam pengerukan pasir di kawasan Brantas Tengah, salah satunya yaitu Kabupaten Jombang. Nilai ekonomi yang tinggi menyebabkan warga DAS Brantas tertarik melakukan aktivitas pengambilan pasir. Pengambilan pasir pada mulanya menggunakan alat manual berupa *cikrak*, namun kedalaman Sungai Brantas yang semakin tinggi akibat dari pengambilan pasir menyebabkan permasalahan. Penambang pasir tidak bisa mengambil pasir, akhirnya pada tahun 2000 terjadi modernisasi alat untuk mempermudah pengambilan pasir dengan menggunakan mesin penyedot pasir (*sandpump*).

Kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi dan didukung dengan penghasilan sebagai penambang pasir yang besar menyebabkan warga terutama warga DAS Brantas memanfaatkan peluang tersebut. Penambang pasir mekanik tidak memerlukan kualifikasi keahlian khusus atau batasan umur, tenaga yang kuat menjadi keahlian utama yang dibutuhkan sebagai penambang pasir mekanik. Penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder tidak memiliki ijin penambangan serta penggunaan alat mekanik melanggar Perda Prov. Jatim Pasal 7 No. 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang menjelaskan bahwa usaha pertambangan dilakukan dengan cara manual/tradisional dan tidak menggunakan alat-alat mekanik.

Menurut Fisher (2001, dikutip dari Novri Susan, 2010:102), kondisi di

atas merupakan kondisi prakonflik. Prakonflik merupakan periode saat terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih sehingga timbul konflik (Susan, 2010:102). Warga DAS Brantas dan pemerintah menyadari ketidaknyamanan atas peralihan alat penambangan pasir dengan menggunakan alat mekanik. Namun, masyarakat DAS Brantas dan pemerintah setempat masih membiarkannya, belum ada ketegasan dari pemerintah.

### 2) Konfrontasi

Modernisasi alat penambangan pasir mekanik pada tahun 2000an menyebabkan aktivitas penambangan pasir menjadi tidak terkendali. Hampir setiap hari dalam waktu 24 jam penambang pasir tidak berhenti melakukan aktivitas penambangan pasir di Sungai Brantas. Dari beberapa kondisi dan pernyataan dari beberapa informan, tahun 2000 mulai munculnya reaksi dan aksi dari warga DAS Brantas dan pemerintah Kabupaten Jombang. Warga Desa Gebangbunder menyampaikan keluhannya kepada Kepala Desa Gebangbunder karena merasa resah terhadap aktivitas penambangan pasir mekanik tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak hanya penertiban oleh Satpol PP, namun sosialisasi secara berkala diberikan oleh Pemkab Jombang sebagai upaya memberikan pemahaman bahayanya aktivitas penambangan pasir.

Menurut Fisher (2001, dikutip dari Novri Susan, 2010:102) kondisi tersebut merupakan dinamika konflik sudah pada konfrontasi. Konfrontasi memperlihatkan suatu tahap pada saat konflik mulai terbuka. Terdapat aksi mobilisasi individu atau kelompok untuk melakukan suatu gerakan atas ketidaknyamanan situasi aktivitas penambangan pasir mekanik. Warga DAS Brantas Desa Gebangbunder menyampaikan reaksi terhadap aktivitas penambangan pasir mekanik kepada kepala desa. Upaya untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir tidak hanya

dalam bentuk penertiban oleh Satpol PP, namun dalam bentuk sosialisasi juga dilakukan dengan tujuan memberi kesadaran untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir mekanik yang dapat mengancam keberlanjutan Sungai Brantas.

### 3) Krisis

Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder. Satpol PP setiap hari mengontrol penambangan pasir hingga terjadi gerakan sosial dari warga DAS Brantas di Desa Megaluh untuk menghentikan aktivitas tersebut. Satpol PP tidak hanya melakukan tindakan ancaman namun mencapai pada tahap tindakan nyata, berupa penyitaan hingga pembakaran alat penambangan pasir mekanik. Tindakan yang dilakukan Satpol PP merupakan tugas penertiban bagi masyarakat yang menyalahi aturan. Penambang pasir mengetahui secara jelas pelanggaran dan ancaman aktivitas penambangan pasir mekanik melalui sosialisasi yang telah diberikan, namun kebutuhan ekonomi menjadi alasan berlangsungnya aktivitas penambangan pasir mekanik tersebut.

Aktivitas penambangan pasir mekanik yang berlangsung di wilayah tanggul Sungai Brantas Desa Megaluh menyebabkan aksi dilakukan oleh warga DAS Brantas Desa Megaluh. Aksi dilakukan oleh warga Desa Megaluh dengan *mengketapeli* penambang pasir yang sedang melakukan penambangan di wilayah tanggul Desa Megaluh. Aksi tersebut dilakukan untuk menghentikan aktivitas tersebut.

Fisher menjelaskan tahap ketika konflik pecah menjadi bentuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan secara intens dan masal merupakan dinamika konflik pada tahapan krisis (Susan, 2010:102). Aksi yang dilakukan oleh Satpol PP secara terus-menerus untuk menertibkan aktivitas penambangan pasir mekanik dan berbagai gerakan yang dilakukan pihak-pihak yang merasa dirugikan seperti warga DAS

Brantas merupakan puncak konflik penambangan pasir mekanik.

### 4) Pascakonflik

Bupati Kabupaten Jombang prihatin atas kondisi penambangan pasir mekanik, akhirnya Bupati Jombang melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan tentang pemeliharaan Sungai Brantas. BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Brantas dan PJT I (Perum Jasa Tirta) merupakan pihak yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan Sungai Brantas. Pemkab Jombang, BBWS Brantas dan PJT I bekerjasama dan menghasilkan MoU (*Memorandum of Understanding*) tentang Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif.

Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif merupakan program pemberdayaan yang ditujukan untuk penambang pasir agar berhenti melakukan aktivitas penambangan. Pemberdayaan tersebut berusaha membuat penambang pasir bisa memampukan diri dan berdaya untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa bekerja sebagai penambang pasir dan menjaga lingkungan Sungai Brantas dari penambang maupun dari tanaman-tanaman liar.

Menurut Susan (2010:103) ketika konflik mengalami puncaknya (konfrontasi) maka situasi tersebut tergantung pada proses penanganan konfliknya. Jika kedua belah pihak mampu melakukan negosiasi dan menggunakan strategi pemecahan masalah (*problem solving*) kemungkinan situasi yang dihasilkan cukup positif dan mengurangi jumlah kerugian bersama (Susan, 2010:103). Situasi tersebut dinamakan pascakonflik.

Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif terdapat koordinator dan pendampingnya pada setiap wilayah desa. Masing-masing sub program memiliki koordinator dan pendamping masing-masing. Koordinator

dan pendamping dipilih oleh BPM-PD Kabupaten Jombang, BBWS Brantas dan PJT I.

Fisher (2001, dikutip dari Novri Susan, 2010:103) menjelaskan bahwa pascakonflik merupakan situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua belah pihak. MoU tentang Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif tersebut merupakan hasil dari negosiasi yang digagas oleh Pemkab Jombang. Harapan dari program tersebut tercapainya kesejahteraan untuk semua pihak baik penambang pasir dan warga DAS Brantas.

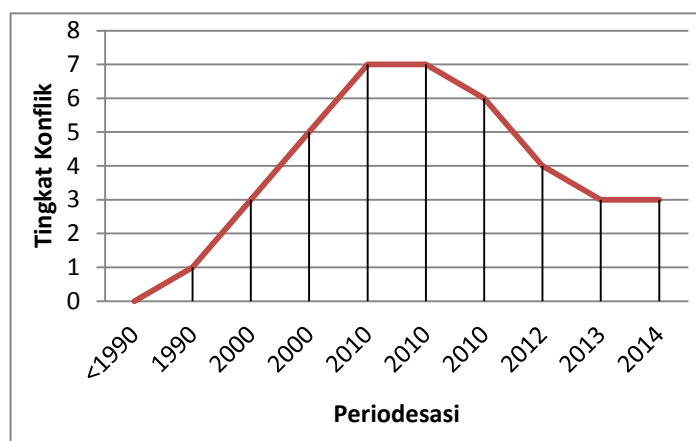
Menurut Wehr (2003, dikutip dari Novri Susan, 2010:66) dinamika konflik merupakan kondisi dimana ditandai oleh eskalasi dan deeskalasi konflik. Eskalasi konflik adalah meningkatnya berbagai tindakan koersif kedua belah pihak berkonflik sehingga aksi kekerasan timbal balik bisa muncul dalam situasi tersebut. Eskalasi konflik selalu ditandai dengan dan disebabkan oleh meningkatnya aktivitas solidaritas konflik, pergerakan sumber daya konflik dan eskalasi strategis (Susan, 2010:66). Strategi eskalasi adalah respon “rasional” dari satu pihak berkonflik yang melihat tindakan-tindakan lawan. Menurut Bartos dan Wehr (2003, dikutip dari Novri Susan, 2010:66) deeskalasi konflik akan muncul dengan ditandai dan disebabkan oleh penurunan aktivitas solidaritas konflik, sumber daya konflik dan eskalasi strategis.

Konflik penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder telah mengalami dinamika konflik, mulai dari terjadinya eskalasi ditandai dengan memuncaknya konflik yaitu berbagai gerakan dari warga DAS Brantas dan Pemerintahan Jombang. Konflik penambangan pasir mekanik tersebut juga telah mengalami deeskalasi yang ditandai dengan menurunnya jumlah penambangan pasir mekanik di bantaran Desa

Gebangbunder. Jumlah penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan sebelum adanya Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif berjumlah  $\pm$  35 galangan (wawancara dengan Pak Andy, 27 Februari 2014). Berdasarkan hasil observasi peneliti jumlah penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder saat ini berjumlah 4 perahu beserta alat penambangan pasirnya.

Dinamika konflik penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder mengalami eskalasi hingga deeskalasi. Keadaan stabilitas sebelum terjadinya konflik ketika aktivitas penambangan pasir belum berlangsung. Munculnya penambangan pasir tradisional hingga berkembangnya alat menjadi mekanik merupakan pergerakan menuju konflik penambangan pasir mekanik. Berdasarkan uraian diatas tahapan dinamika konflik penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder, berikut grafik dinamikanya:

**Grafik 1. Dinamika Konflik Penambangan Pasir Mekanik di Desa Gebangbunder**



Sumber: Observasi dan Hasil Wawancara Peneliti

**Keterangan :**

- 0 : Keadaan tanpa konflik
- 1 : Muncul penambang pasir manual
- 3 : Berkembangnya alat penambang pasir manual ke modern



- 5 : Tidak terkendalinya aktivitas penambangan pasir mekanik
- 7 : Terjadi konflik penambang pasir dengan warga Desa Gebangbunder dan Desa Megaluh
- 5 : Muncul program pengamanan tanggul Sungai Brantas berbasis partisipatif
- 4 : Terjadi deeskalasi atau penurunan aktivitas konflik karena aktivitas penambangan pasir menurun
- 3 : Aktivitas penambangan di Desa Gebangbunder masih berlangsung

## PEMETAAN KONFLIK

### 1) Isu Konflik

Amr Abdalla (2002, dikutip dari Novri Susan, 2010:98) menjelaskan bahwa isu menunjuk pada saling keterkaitan tujuan-tujuan yang tidak sejalan di antara pihak bertikai. Konflik penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder terjadi antara kelompok penambang pasir mekanik dengan pemerintah dan dengan warga DAS Brantas. Perkembangannya, konflik penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder tidak hanya melibatkan beberapa aktor diatas, namun terdapat konflik peran didalamnya dalam implementasi Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif. Berikut penjelasannya terhadap isu konflik penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder:

- a) Pelanggaran Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2005 tentang aktivitas penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder menyebabkan penertiban dilakukan oleh Satpol PP Kecamatan Plandaan;
- b) Operasi Patas (Penertiban Sungai Brantas) tidak membuat penambang pasir jera untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir mekanik;
- c) Anggota Satpol PP Kecamatan Plandaan hanya berjumlah 4 orang menyebabkan kerja sama dilakukan dengan Muspika Plandaan, yaitu TNI, Polsek Plandaan dan Pemerintah Kecamatan Plandaan. Polsek Plandaan membocorkan jadwal operasi

- penertiban kepada pemilik penambang pasir mekanik, yang menyebabkan hilangnya barang bukti saat operasi;
- d) Aktivitas penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder menuai protes sebagian warga DAS Brantas Desa Gebangbunder kepada Kepala Desa Gebangbunder untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir mekanik yang mengancam pemukiman serta merusak infrastruktur;
- e) Sebagian besar penambang pasir mekanik di Desa Gebangbunder merupakan warga Desa Gebangbunder, yang menyebabkan warga Desa Gebangbunder tidak bisa melakukan aksi protes oleh semua warga desa dan hanya dilakukan oleh sebagian warga;
- f) Pemerintah Desa Gebangbunder tidak bisa bersikap tegas dalam melihat aktivitas penambangan pasir mekanik yang masih berlangsung, karena pemilik penambang pasir memberikan dana untuk pembangunan desa, seperti jalan dan mushola;
- g) Proses penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder mendekati tanggul Sungai Brantas wilayah Desa Megaluh menyebabkan reaksi dari warga Desa Megaluh untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir mekanik melalui aksi pengketapelan;
- h) Konflik penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder menyebabkan kerja sama dilakukan oleh Pemda, BBWS Brantas dan PJT I untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir mekanik, namun dalam proses perumusan kebijakan tersebut tanpa dilibatkannya penambang pasir, sehingga menyebabkan perumusan kebijakan bersifat *top-down*. Perumusan kebijakan tersebut menghasilkan Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif, terdapat 2 sub program yaitu Pokmas Brantas dan Jogo Tanggul;
- i) Implementasi Pokmas Brantas untuk anggota Pokmas dalam menerima bantuan hewan ternak tidak

- dikembangkan sebagaimana mestinya akan tetapi dijual untuk membeli keperluan lainnya;
- j) Salah satu anggota Jogo Tanggul wilayah Desa Gebangbunder ikut melakukan aktivitas penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder.

## 2) Sumber Konflik

Menurut Amr Abdalla (2001, dikutip dari Novri Susan, 2012:98) sumber konflik merupakan penyebab terjadinya konflik sehingga melahirkan berbagai tipe-tipe konflik. Aktivitas penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder melanggar Perda Prov. Jatim Pasal 7 No. 1 tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, penambangan pasir dengan menggunakan alat mekanik dilarang. Penambangan pasir mekanik menyebabkan beberapa dampak terhadap lingkungan Sungai Brantas yaitu jebolnya tanggul, jalan raya di DAS Brantas menjadi rusak serta suara alat penambangan pasir yang keras menyebabkan warga DAS Brantas terganggu dan resah terhadap aktivitas tersebut.

Konflik penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder memiliki beberapa penyebab. Berikut penjelasannya:

- a) Aktivitas penambangan pasir mekanik yang melanggar Perda Prov. Jatim Pasal 7 No. 1 Tahun 2005;
- b) Aktivitas penambangan pasir mekanik meresahkan warga DAS Brantas Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan;
- c) Penambang pasir mekanik mengambil pasir mengarah pada wilayah tanggul Sungai Brantas wilayah Desa Megaluh Kecamatan Plandaan;
- d) Penertiban yang dilakukan Satpol PP Kecamatan Plandaan dan Muspika Plandaan tidak bisa membuat jera penambang pasir mekanik;
- e) Program pengamanan tanggul Sungai Brantas berbasis partisipatif sebagai bentuk MoU dari Pemkab Jombang, BBWS Brantas dan PJT I tidak bisa

menghentikan aktivitas penambangan pasir mekanik;

- f) Kebutuhan ekonomi menjadikan solidaritas penambang pasir mekanik semakin kuat dan masih berlangsungnya aktivitas penambangan pasir mekanik.

## 3) Aktor Konflik

Menurut Amr Abdalla melalui model SIPABIO (2002, dikutip dari Novri Susan, 2012: 98), aktor konflik merupakan pihak berkonflik dalam bentuk individu maupun kelompok yang berpartisipasi dalam konflik. Pihak berkonflik dibagi menjadi beberapa, antara lain pihak utama yang secara langsung berhubungan dengan kepentingan, pihak sekunder yang tidak secara langsung terkait dengan kepentingan. Konflik penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder melibatkan beberapa pihak. Pihak utama yang terlibat secara langsung adalah penambang pasir mekanik, warga DAS Brantas (Desa Gebangbunder dan Desa Megaluh) dan Satpol PP Kecamatan Plandaan. Satpol PP dalam upaya penertiban bekerja sama dengan Muspika Plandaan. Konflik penambangan pasir mekanik menyebabkan kerja sama yang dilakukan Pemkab Jombang dibawah tanggung jawab BPM-PD Kabupaten Jombang, BBWS Brantas dan PJT I, dimana menghasilkan Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif. Program tersebut terdapat pendamping dan koordinator pada masing-masing sub program. Berikut aktor konflik tersebut:

- 1) Aktor Utama, yaitu pemilik penambang pasir mekanik, pekerja penambang pasir mekanik yang terlibat secara langsung dalam konflik dengan warga DAS Brantas dan Satpol PP Kecamatan Plandaan. Warga DAS Brantas terdiri dari Desa Megaluh dan Desa Gebangbunder.
- 2) Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik penambangan pasir mekanik yaitu Muspika Plandaan (Pemerintah

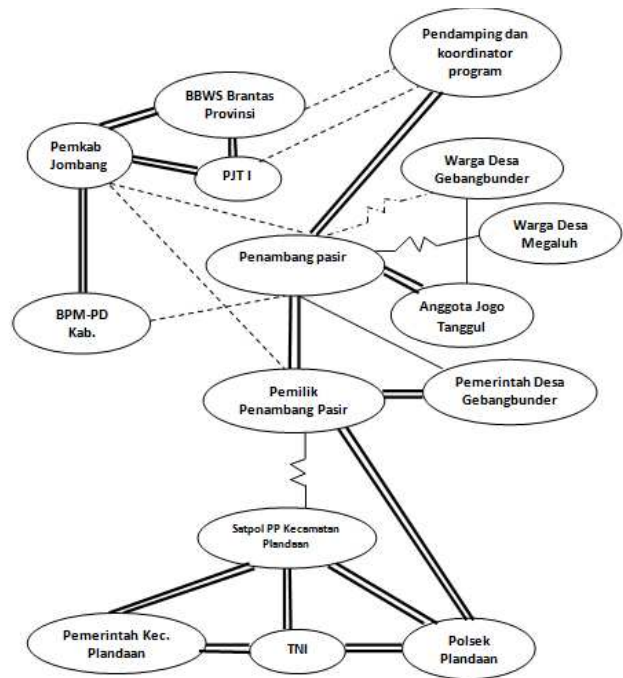
Kecamatan Plandaan, TNI dan Polsek Plandaan), Pemkab Jombang, BPM-PD Kabupaten Jombang, BBWS Brantas, PJT I, pendamping dan korrdinator program serta anggota Jogo Tanggul Desa Gebangbunder.

Konflik yang terjadi pada sebuah kelompok akan menunjukkan identitas in-group dalam melawan kelompok out-group (Susan, 2009:62). Konflik penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder menyebabkan tumbuhnya solidaritas *in-group* dalam melawan *out-group* yang dianggap tidak memiliki kepentingan yang sama. Pada tahap implementasi Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif membentuk kelompok atas kepentingan yang sama. Berikut aktor konflik berdasarkan implementasi program pemberdayaan di Desa Gebangbunder:

- 1) *In-group*, yaitu berlangsungnya aktivitas penambangan pasir mekanik yang melibatkan pemilik penambang pasir mekanik, pekerja penambang pasir mekanik. Ketidakberfungsian elemen pemerintah seperti, pemerintah Desa Gebangbunder dan Polsek Plandaan yang menyebabkan penambangan pasir mekanik tetap berlangsung serta anggota Jogo Tanggul yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
- 2) *Out-group*, yaitu pihak yang dianggap berbeda kepentingan dengan penambang pasir yaitu warga DAS Brantas, Satpol PP, TNI, Pemerintah Kecamatan Plandaan, Pemkab, BBWS, Pendamping dan koordinator program yang secara bersama menjaga keberlangsungan Sungai Brantas.

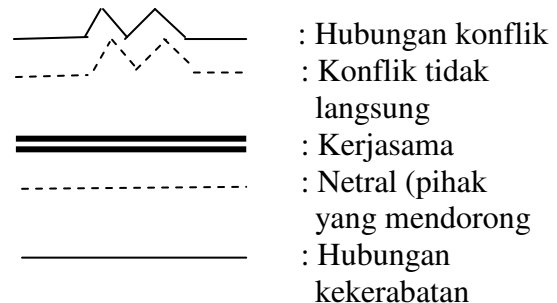
Berikut ini merupakan pemetaan konflik penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder:

**Bagan 1. Pemetaan Konflik  
Penambangan Pasir Mekanik Desa  
Gebangbunder (2000-2014)**



Sumber: Observasi dan Hasil Wawancara Peneliti

**Keterangan Bagan:**



# KEGAGALAN REKONSILIASI MELALUI PROGRAM PENGAMANAN TANGGUL SUNGAI BRANTAS BERBASIS PARTISIPATIF

Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif merupakan hasil dari perumusan kerjasama oleh BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Brantas dan PJT I (Perum Jasa Tirta). Proses kerja sama tersebut merupakan tahapan ketika konflik mengalami deeskalasi. Program tersebut digagas karena kondisi Sungai Brantas sudah mulai

berbahaya jika aktivitas penambangan pasir mekanik terus berlangsung.

Menurut Coser, konflik memiliki fungsi positif dalam sebuah kelompok. Beberapa fungsi konflik dalam sistem sosial khususnya pada hubungan lembaga yaitu perubahan sosial (Coser, 1957:197). Konflik memandang perubahan sosial karena dengan adanya konflik akan melahirkan konsensus. Negosiasi yang dilakukan pihak-pihak tersebut menghasilkan nilai-nilai dan norma yang baru. Nilai-nilai dan norma tersebut menghasilkan perubahan sosial. Aturan yang dimuat dalam program pemberdayaan tersebut mengikat mantan penambang pasir sehingga secara sukarela atau terpaksa mantan penambang pasir akan menaatinya.

Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif memiliki tujuan dapat menghilangkan akar konflik sumber daya tersebut, yaitu penambangan pasir mekanik. Menurut Coser (1957, dikutip dari Novri Susan, 2012:14) katup penyelamat (*safety-valve*) merupakan lembaga yang menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang akan mempertahankan integrasi suatu masyarakat. Katup penyelamat melalui praktek-praktek atau institusi dapat menjadi media pengungkapan rasa tidak puas terhadap struktur. Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif merupakan katup penyelamat dari konflik penambangan pasir mekanik di Kabupaten Jombang. Program tersebut dibentuk secara sengaja oleh pemerintah Kabupaten Jombang melalui kerja sama dengan BBWS Brantas dan PJT I untuk menyelesaikan konflik penambangan pasir mekanik di Kabupaten Jombang. Menurut Susan katup penyelamat merupakan kelembagaan yang mengatur bagaimana konflik dikelola, agar konflik tidak tersumbat dan meledak sebagai kekerasan (email, April 3, 2014).

Program tersebut merupakan solusi untuk meredakan konflik melalui pemberdayaan yang bertujuan

mengalihkan pekerjaan sebagai penambang pasir. Hasil dari kerjasama pihak-pihak yang terkait perlindungan Sungai Brantas berbasis pada pemberdayaan mantan penambang pasir. Payne (dikutip dari Isbandi R.A, 2008) menjelaskan tentang pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan guna:

*(Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan).*

Menjadikan mantan penambang pasir meningkat dalam kemampuan diri sehingga dapat menjadi sejahtera. Mantan penambang pasir diberikan pelatihan berwirausaha dan perlindungan Tanggul Sungai Brantas. Diikutsertakan dalam menjaga tanggul guna lebih peduli dan meninggalkan pekerjaan penambang pasir merupakan tujuan dari Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif. Coser (1956, dikutip dari Poloma, 2010:108) katup penyelamat berfungsi sebagai “jalan keluar yang meredakan permusuhan”, tanpa adanya jalan keluar hubungan-hubungan di antara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin tajam. Melalui pemberdayaan kepada mantan penambang pasir mekanik agar beralih dan konflik penambangan pasir dapat dihentikan.

Menurut Coser (1956, dikutip dari Poloma, 1987:109) katup penyelamat akan membantu dalam meminimalisir dari konflik sosial, berikut penjelasan Coser (1956):

*“Lewat katup penyelamat (safety valve) itu permusuhan dihambat agar berpaling melawan objek*

*aslinya. Tetapi penggantian yang demikian mencakup juga biaya bagi sistem maupun individu: mengurangi tekanan untuk menyempurnakan sistem untuk memenuhi kondisi-kondisi yang sedang berubah maupun membendung ketegangan dalam diri-individu, menciptakan kemungkinan tumbuhnya ledakan-ledakan destruktif”.*

Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas sebagai *safety valve* diharapkan mampu mengurangi konflik yang sedang berlangsung. Berdasarkan penjelasan Coser (1956) diatas, agar terpenuhinya *safety valve* yang ideal sebagai jalan keluar untuk meredakan konflik, program pemberdayaan sebagai sistem maupun individu atau kelompok sebagai pelaksana *safety valve* tersebut harus mampu memenuhi kondisi-kondisi yang sedang berubah maupun ketegangan yang tercipta dalam kelompok agar terhindar dari kemungkinan tercapatnya ledakan-ledakan konflik selanjutnya.

Implementasi dari Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif sebagai *safety valve* tidak berjalan efektif. Berikut situasi-situasi yang menyebabkan tidak efektifnya *safety valve* sebagaimana dijelaskan oleh Coser (1956) diatas, antara lain:

- 1) Proses perumusan program bersifat *top-down*, tidak dilibatkannya penambang pasir mekanik sebagai salah satu aktor utama penyebab konflik dalam pembuatan kebijakan menyebabkan kebutuhan dasar penambang pasir mekanik tidak diketahui oleh pemerintah;
- 2) Berlangsungnya penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder setelah adanya program pemberdayaan;
- 3) Pemerintah tidak bisa bersikap tegas dalam penertiban serta implementasi program pemberdayaan tersebut, sehingga penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder semakin berkembang;

- 4) Sebagian besar pemilik penambangan pasir maupun pekerjanya merupakan warga Desa Gebangbunder menyebabkan solidaritas warga DAS Brantas Desa Gebangbunder tidak bisa tercipta secara keseluruhan dalam aksi mobilisasi karena terhambat oleh rasa persaudaraan;
- 5) Solidaritas yang tercipta dalam kelompok penambang pasir mekanik dipergunakan dalam aktivitas penambangan pasir mekanik;
- 6) Solidaritas penambang pasir mekanik menghambat berjalannya program pemberdayaan;
- 7) Anggota Pokmas Brantas sebagai sub program pemberdayaan tidak melaksanakan program sebagaimana mestinya, kambing yang diberikan pemerintah untuk dikembangkan justru dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;
- 8) Anggota Jogo Tanggul sebagai sub program pemberdayaan bertugas menjaga tanggul dari tanaman liar maupun penambang pasir, implementasinya untuk wilayah Desa Gebangbunder, salah satu anggota Jogo Tanggul ikut serta dalam aktivitas penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder.

Katup penyelamat yang dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya meredakan konflik tidak berjalan efektif. Program pemberdayaan sebagai sistem *safety valve* tidak mampu menghentikan aktivitas penambangan pasir mekanik secara keseluruhan untuk wilayah Kabupaten Jombang. Pemerintah maupun sasaran program pemberdayaan tersebut juga tidak mampu menjalankan perannya dalam implemtasi *safety valve* tersebut. Berikut penjelasan faktor penyebab ketidakefektifan Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif sebagai *safety valve* dalam konflik penambangan pasir mekanik:

- 1) **Solidaritas Penambang Pasir sebagai Penghambat Rekonsiliasi**

Berlangsungnya aktivitas penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder menyebabkan peluang konflik muncul kembali. Penambang pasir mekanik melakukan aktivitasnya di area lahan milik warga. Penambang membayar sebagai ganti rugi tergerusnya lahan warga akibat dari penambangan pasir mekanik.

Konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial (Poloma, 2000:107). Konflik akan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik yang sedang berlangsung dengan *out-group* dapat memperkuat identitas para anggota kelompok. Kelompok penambang pasir dengan adanya konflik antara warga dan Satpol PP akan semakin menguatkan identitas kelompok penambang pasir. Identitas kelompok akan semakin kentara perbedaannya ketika kelompok penambang pasir melakukan perlawanan atas kepentingan yang dianggap berbeda.

Solidaritas terbentuk karena terancamnya kelompok penambang pasir dengan pihak luar yaitu Satpol PP dan warga DAS Brantas. Saling memberi informasi antar penambang pasir merupakan bentuk solidaritas yang muncul karena kepentingan yang sama yaitu berlangsungnya aktivitas penambangan pasir mekanik. Kebersamaan penambang pasir mekanik yang bersifat kekeluargaan menyatukan dan menumbuhkan solidaritas kelompok penambang pasir mekanik di Desa Gebangbunder. Kelompok penambang pasir akan saling melindungi anggota kelompok lain, mereka akan menyebarkan jadwal operasi penambangan pasir dan secara bersama menghilangkan barang bukti. Aksi mobilisasi dalam bentuk perlawanan akan menciptakan solidaritas, integrasi dan kerjasama dalam kelompok penambang pasir. Kelompok penambang pasir akan semakin kuat strukturnya akibat dari konflik tersebut.

Solidaritas konflik muncul dalam tiga tahapan, yaitu ketika interaksi individu-individu anggota terbangun

secara intensif, tumbuhnya rasa saling memiliki dan suka terhadap sesama anggota, dan mulai terikatnya individu pada kesamaan kepercayaan (keyakinan), nilai-nilai dan norma (Susan, 2012:24). Ketiga proses ini akan teraktualisasi dan dipicu oleh adanya fakta kekejian (*hostility*) dalam bentuk tindakan koersif kelompok lain. Masing-masing anggota kelompok penambang pasir memiliki kepentingan yang sama, yaitu kebutuhan ekonomi.

Interaksi yang tumbuh di area penambangan dan didukung oleh tindakan koersif nyata (warga Desa Megaluh) serta koersif ancaman (Satpol PP beserta Muspika Plandaan) menumbuhkan solidaritas kelompok penambang pasir yang semakin kuat. Kerjasama dalam menyelesaikan masalah seperti protes pemilik lahan dapat diselesaikan tanpa terjadi tindakan kekerasan merupakan salah satu bentuk solidaritas anggota penambang pasir. Kuatnya solidaritas dalam penambang pasir mekanik melanggengkan aktivitas penambangan pasir mekanik.

Aksi protes yang dilakukan oleh sebagian warga Desa Gebangbunder kepada Kepala Desa sebagai bentuk rasa ketidaknyamanan tidak berdampak pada penurunan aktivitas penambang pasir mekanik. Sebagian besar penambang pasir mekanik di Desa Gebangbunder merupakan warga Desa Gebangbunder. Keadaan tersebut berbenturan dengan rasa kekeluargaan yang sudah tumbuh dalam masyarakat. Keadaan tersebut menjadikan penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder sampai sekarang masih berlangsung.

Berdasarkan observasi penulis, salah satu anggota Jogo Tanggul wilayah Desa Gebangbunder melakukan aktivitas penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder. Terdapat beberapa tugas dan tanggung jawab anggota Jogo Tanggul, yaitu melaporkan kepada pengawas apabila terdapat penambangan pasir mekanik dan ikut serta memelihara

ekosistem Sungai Brantas (BPM-PD Kabupaten Jombang, 2012). Selain kebutuhan ekonomi menjadi alasan salah satu anggota Jogo Tanggul melakukan aktivitas penambangan pasir, solidaritas yang tumbuh sebagai warga Desa Gebangbunder menyebabkan anggota Jogo Tanggul tidak melaporkan pelanggaran aktivitas tersebut dan justru ikut terlibat dalam penambangan pasir mekanik.

## **2) Perumusan Program yang Bersifat Top-Down**

Perumusan Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif tersebut digagas oleh Pemda Jombang, BBWS Brantas dan PJT I. Perumusan dilakukan tanpa melibatkan elemen penambang pasir atau warga DAS Brantas.

Wewenang dan kekuasaan yang legal oleh ketiga instansi tersebut dan menghasilkan kerjasama. Situasi tersebut mencerminkan pemerintah melakukan kebijakan yang bersifat *top-down* dan keputusan berdasar pada posisi kekuasaan dan wewenang.

Menurut Santoso dan Tri Susdinarjanti (dikutip dari Lambang Trijono, dkk, 2004:270) dalam proses perumusan kebijakan terdapat dua hal yang penting yaitu, *pertama*, partisipasi politik diperlukan dalam demokrasi agar korespondensi antara keputusan kebijakan dengan kehendak rakyat bisa terjamin. *Kedua*, proses kebijakan harus diformat sedemikian sehingga partisipasi politik menjadi lebih bermakna bagi masyarakat dan lebih kondusif bagi pencapaian kebijakan tersebut.

Pemilik penambangan pasir maupun penambang pasir, dimana menjadi aktor utama konflik penambangan pasir tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Aspirasi maupun kebutuhan dasar penambangan pasir tidak diketahui secara langsung oleh pemerintah. Partisipasi pemilik penambang pasir maupun penambang pasir menjadi utama

demikian efektifnya implementasi kebijakan yang dibuat.

Implementasi dari Pokmas Brantas berjalan tidak efektif, kambing yang diberikan oleh anggota pokmas dijual untuk memenuhi kebutuhan. Perumusan kebijakan harus diformat sedemikian sehingga partisipasi politik menjadi lebih bermakna bagi masyarakat dan lebih kondusif bagi pencapaian kebijakan tersebut (Santoso dan Tri Susdinarjanti, dikutip dari Lambang Trijono, dkk, 2004:270). Tanpa adanya partisipasi dalam perumusan kebijakan oleh elemen yang secara langsung terlibat konflik menyebabkan kebijakan yang dibuat tidak berjalan sebagaimana mestinya serta tidak bermakna untuk masyarakat.

## **3) Kegagalan Koordinatif dan Ketidaktegasan Pemerintah dalam Implementasi Program**

Operasi Patas (Penertiban Sungai Brantas) yang dilakukan Satpol PP sebelum dan sesudah berlangsungnya program pemberdayaan tersebut seringkali gagal, Satpol PP kehilangan barang bukti berupa perahu dan mesin penambangan pasir. Terdapat kerjasama yang dilakukan oleh Satpol PP Kecamatan Plandaan dengan Muspika Plandaan yaitu Polsek, Koramil dan Pemerintah Kecamatan. Kerjasama tersebut bertujuan untuk membantu tugas Satpol PP Kecamatan Plandaan dengan menambah personil dari beberapa instansi pemerintah kecamatan. Implementasinya terdapat pembocoran jadwal Operasi Patas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pihak Polsek Plandaan memberitahu jadwal Operasi Patas kepada penambang pasir, selanjutnya penambang pasir akan memberitahu kepada rekan-rekannya untuk menghilangkan barang bukti aktivitas penambangan.

Konflik dapat membantu mengeratkan ikatan kelompok yang terstruktur secara longgar (Ritzer, 2007:159). Masyarakat yang berkonflik dengan masyarakat lain dapat memperbaiki kepaduan integrasi. Konflik

dapat mengaktifkan peran individu dan membantu fungsi komunikasi (Ritzer, 2007:159). Konflik penambangan pasir di Desa Gebangbunder dapat mengintegrasikan anggota kelompok penambang dalam melakukan kerjasama saat aktivitas penambangan pasir. Kerjasama dilakukan saat terjadi operasi, konflik penambangan pasir mekanik juga membuka komunikasi kelompok penambang pasir di Desa Gebangbunder terhadap Polsek Plandaan. Komunikasi tersebut ditandai dengan adanya informasi tentang jadwal Operasi Patas yang akan dilakukan Satpol PP beserta Muspika Plandaan.

Konflik penambangan pasir tidak hanya menyatukan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan BBWS Brantas dan PJT I. Konflik penambangan pasir juga membuka peluang komunikasi yang tercipta demi kepentingan ekonomi. Elemen pemerintah yaitu Polsek Plandaan dibalik tugasnya melalui kerja sama dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban aktivitas penambangan pasir membuka komunikasi dengan penambang pasir mekanik. Peluang digunakan Polsek Plandaan dalam keadaan konflik tersebut. Kerjasama tersebut berakibat membuat Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif berjalan tidak efektif.

Pemerintah Desa Gebangbunder juga tidak tegas dalam melakukan pengawasan aktivitas penambangan di wilayahnya sendiri. Penambang pasir mekanik memberi uang dalam bentuk sumbangan untuk pembangunan infrastruktur desa. Berdasarkan Perda Provinsi yang melarang dengan keras aktivitas penambangan pasir mekanik tersebut. Pemerintah Desa Gebangbunder sebagai penanggung jawab atas daerahnya serta sebagai pengawas Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas tidak menjalankan tugas dan perannya dengan efektif, dengan

membiarkan berlangsungnya aktivitas penambangan pasir mekanik.

Pemerintah Desa Gebangbunder yang bersifat longgar dan didukung oleh berbenturannya posisi pelanggaran dilakukan oleh sebagian warga Desa Gebangbunder menyebabkan pertarungan posisi. Posisi pemerintah sebagai pengawas sekaligus penanggung jawab dalam implementasi program pemberdayaan tersebut berbenturan dengan sebagian besar warga Desa Gebangbunder yang menjadikan pekerjaan penambang pasir menjadi pekerjaan utama. Pemilik penambang pasir juga memberikan dana untuk pembangunan infrastruktur desa serta penambang pasir menambang di area lahan warga, dimana penambang pasir memberikan kompensasi sebagai ganti rugi kepada pemilik lahan. Keadaan tersebut menyebabkan Pemerintah Desa Gebangbunder tidak bisa bersikap tegas dalam implementasi Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif tersebut.

## **SIMPULAN**

### **1) Dinamika Konflik Penambangan**

Konflik penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan mengalami dinamika mulai dari prakonflik, dimana mulai munculnya penambang manual. Protes warga DAS Brantas Desa Gebangbunder menjadi tahapan konfrontasi. Aksi nyata Satpol PP dan warga DAS Brantas Desa Megaluh menjadi puncak konflik (krisis). Upaya menyelesaikan konflik penambangan pasir mekanik dilakukan Pemkab Jombang, BBWS Brantas dan PJT I melalui Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif merupakan tahapan pasca konflik. Namun ditataran, kenyataan bahwa penambangan pasir mekanik di Desa Gebangbunder masih berlangsung.



## 2) Ketidakefektifan Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif

Berlangsungnya penambangan pasir mekanik disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu, *pertama* perumusan program pemberdayaan menggunakan pengelolaan konflik bersifat top-down. *Kedua*, solidaritas yang kuat dalam kelompok penambang pasir mekanik menyebabkan terhambatnya proses rekonsiliasi. *Ketiga*, kegagalan pemerintah dalam menjalankan program. Pemerintah tidak tegas dalam

mengawasi aktivitas penambangan pasir mekanik yang masih berlangsung di Desa Gebangbunder dan pembocoran jadwal Operasi Patas oleh Polsek Kecamatan Plandaan.

Hal yang sudah disampaikan diatas yang menjadikan dinamika konflik penambangan pasir mekanik masih berlangsung dan Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif sebagai bentuk rekonsiliasi menjadi tidak efektif.

## Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- BPM-PD Kabupaten Jombang. 2012. *Program Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipatif di Kabupaten Jombang*. Jombang: BPM-PD Kabupaten Jombang.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chadwick, Bruce A.,dkk. 1984. *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*. New Jersey: Englewood Cliffts.
- Coser, Lewis A.. 1984. *The Functions of Social Conflict*. United States of America: First Free Press.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Ghony, Djunaidi dan Fauzah Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Johnson, Doyle Paul. 1981. *Sociological Theory. Terjemahan Robert M.Z. Lawang. Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. 1988. Cetakan 2. Jakarta: Gramedia.
- K. Yin, Robert. 2006. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Krisyantono, Rahmat. 2006. *Teknis Praktis Riset Komunikasi: disertai contoh praktis riset media, public relations, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Kum, Krinus. 2013. *Konflik Pemearan Wilayah di Tanah Papua*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J.. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Polama, Margaret M.. 1987. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: CV.Rajawali.
- Pruitt, Dean G. Dan Jeffrey Z. Rubin. 1986. *Social Conflict. Escalation, Stalemate and Settlement. McGraw-Hill*. Terjemahan Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. 2011. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Santoso, Purwo dan Tri Susdinarjanti. *Konflik dalam Perumusan Kebijakan Publik, Potret Persilangan Kepentingan dalam Menata Peradaban*. Editor Lambang Trijono, dkk. 2004. *Potret Retak Nusantara, Studi Kasus Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Susan, Novri. 2012. *Negara Gagal Mengelola Konflik Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia*. Sleman: Pustaka Belajar.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Wahyuni, Niniek Sri dan Yusniati. 2007. *Manusia dan Masyarakat*. Jakarta: Ganeca.

#### **Artikel dari Internet:**

- Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. *Operasional dan Pemeliharaan*. (Online). (<http://www.bbwsbrantas.com>, 18 Nopember 2013).
- Cholisin. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. (Online). (<http://staff.uny.ac.id>, 12 Desember 2013).

- Dial. *Teori-Teori Tentang Konflik dan Rekonsiliasi-Dari Disertasi Hamdi*. (Online). (<http://id.scribd.com/doc>, 16 Desember 2013).
- DIRJEN SDA DPU. 2008. *Profil Balai Besar Wilayah Sungai Brantas*. (Online). (<http://www.pu.go.id>, 3 Desember 2013).
- Humas Kabupaten Jombang. 2004. *Sosialisasi Penambang Pasir*. (Online). (<http://www.jombangkab.go.id>, 3 Desember 2013).
- Humas Pemda Jombang. 2004. *Sosialisasi Penambang Pasir*. (Online). (<http://www.jombangkab.go.id>, 3 Desember 2013).
- Humas Pemkab Jombnag. 2010. *Pemkab Jombang Serius Tangani Penambang Pasir Liar*. (Online). (<http://www.jombangkab.go.id>, 7 Nopember 2013).
- Jasa Tirta 1. 2012. *Latar Belakang Berdirinya Perum Jasa Tirta 1*. (Online). (<http://www.jasatirta1.co.id>, 5 Desember 2013).
- Jasa Tirta 1. 2012. *Pelatihan Jogo Tanggul-Waspada Dini Bencana Sungai Kali Brantas*. (Online). (<http://www.jasatirta1.co.id>, 5 Mei 2014).
- Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Jombang AM. 2012. *Bupati Suyanto Buka Pelatihan Jaga Tanggul Waspada Dini Bencana*. (Online). (<http://sjam792.blogspot.com>, 25 Desember 2013).
- Mubarak, Taman. 2010. *Warga dan Penambang Pasir Liar di Sungai Brantas Terlibat Baku Tembak*. (Online). (<http://news.detik.com/surabaya>, 25 September 2013).
- Muhammad Taufik. 2010. *Operasi Penambang Pasir, Petugas Bakar Perahu Penambang*. (Online). (<http://www.tempo.co>, 22 Desember 2013).
- Pemerintah Prov. Jatim. 2006. *Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Gol. C Pada Wilayah Sungai di Propinsi Jawa Timur*. (Online). (<http://ditjenpp.kemenkumhM.GO.ID>, 11 Desember 2013).
- Portal Kementrian BUMN. 2012. *Pelatihan Jaga Sarana (Jogo Tanggul) Tahun 2012*. (Online). (<http://www.bumn.go.id>, 17 September 2013).
- Soenardi, Tjutju. *Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif*. (Online). (<http://file.upi.edu>, 2 Januari 2014).
- Staf Data Center 2. 2008. *Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur*. (Online). (<http://jdih.jatimprov.go.id>, 3 Desember 2013).
- Wibowo, Kukuh S.. 2010. *Aktivis Lingkungan Somasi Menteri Pekerjaan Umum*. (Online). (<http://www.tempo.co>, 25 September 2013).

### Jurnal dari Internet:

Coser, Lewis A. 1957. *Social Conflict and The Theory of Social Change*. (Online). (<http://libks.jstor.org>, 1 Desember 2013). The British Journal of Sociology, Vol. 8, No. 3, pp. 197-207.

Lismawati, Tirta. 2013. *Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Penambangan Bahan Galian C melalui Proses Mediasi (Kasus Konflik Penambangan antara PT BRD Banjarnegara dengan LSM GMTB di Sungai Gung Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal)*. (Online). (<http://ejournal-s1.undip.ac.id>, 29 Desember 2013).

Mahrudin. 2012. *Konflik Kebijakan Pertambangan antara Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Buton*. (Online). (<http://jisp.umy.ac.id>, 29 Desember 2013).

Nur, Diah, dkk. 2012. *Konflik Internasional, Resolusi dan Rekonsiliasi*. (Online). (<http://indira-a--fisip10.web.unair.ac.id>, 16 Desember 2013).

Siregar, Gabriel Vishnu Anindita. 2006. *Sengketa Penambang Pasir Mekanik Sungai Brantas: Studi Kasus Sengketa Aktivitas Penambangan Pasir Mekanik di Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri*. (Online). Vol. 1 No. 2.

Ulfah, Maria. 2011. *Penambangan Pasir Liar di Sekitar Sungai Brantas di Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang*. (Online). (<http://digilib.sunan-ampel.ac.id>, 29 Desember 2013)

Yumi, Endang Dwi Hastuti, dkk. 2012. *Pengelolaan Konflik Sumber Daya Hutan*. (Online). (<http://cyberpenyuluhankht.info>, 16 Desember 2013).

### DATA PENULIS

Nama	: Anita Ayu Fatmaningtias
Tempat, Tanggal Lahir	: Jombang, 1 Juli 1992
Alamat	: Jalan Kauman RT 011/RW 001 Desa Megaluh Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang
Email	: Anitaayufatmaningtias@yahoo.com
No Telepon	: 085791120006